

**BAB III**

**PROBLEMATIKA PENYELUNDUPAN**

**NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG**

**DI PERBATASAN ENTIKONG KALIMANTAN**

**BARAT**

Tingkat penyalahgunaan Narkoba di Indonesia memiliki kecenderungan terus meningkat sehingga Indonesia dinyatakan dalam Kondisi Darurat Narkoba. Peredaran dan penyelundupan berbagai jenis Narkoba salah satunya terjadi melalui jalur perbatasan darat Kalimantan. Maraknya penyelundupan Narkoba melalui wilayah perbatasan darat, menuntut peran serta aktif Badan Narkotika Nasional dalam pencegahannya. Di pulau Kalimantan terdapat tiga provinsi di wilayah negara Indonesia yang memiliki perbatasan secara langsung dengan negara tetangga Malaysia, perbatasan di tiga provinsi panjangnya mencapai lebih dari 2.000 kilometer. Dengan panjang perbatasan yang tergolong cukup luas ini, diperlukan sarana dan prasarana guna untuk menunjang masalah penjagaan perbatasan, hal ini perlu demi menciptakan keamanan yang efisien di daerah perbatasan tersebut. Berbagai jenis Narkoba masuk ke wilayah Indonesia melalui beberapa jalur perbatasan darat Indonesia salah satunya Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia Timur<sup>1</sup>.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas dua belas Kabupaten dan dua kota, dari dua belas Kabupaten dan dua kota tersebut terdapat setidaknya lima Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Lima

---

<sup>1</sup> BNN. 2014. *Analisa data pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN)*.

Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu : Kabupaten Sangau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kapual Hulu. Panjang garis batas yang terdapat di lima Kabupaten di Kalimantan Barat ini mencapai 857 Kilometer. Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas dua belas Kabupaten dan dua kota, dari dua belas Kabupaten dan dua kota tersebut terdapat setidaknya lima Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Lima Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu : Kabupaten Sangau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kapual Hulu. Panjang garis batas yang terdapat di lima Kabupaten di Kalimantan Barat ini mencapai 857 Kilometer. Dengan jumlah Kabupaten dengan luas perbatasan yang sangat luas di provinsi Kalimantan Barat ini bisa menjadi faktor meningkatnya kasus penyelundupan karena banyaknya perbatasan yang terdapat di provinsi ini sehingga menjadi susah dalam pengawasan perbatasan.

Perbatasan yang menjadi sasaran bagi penyelundup dan pengedar narkoba dan obat-obat terlarang adalah perbatasan yang berada di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau adalah Kabupaten yang terletak di utara Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau memiliki luas daerah mencapai 12.857,70 Km<sup>2</sup> yang mana mencakup lebih dari 12% luas keseluruhan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 614.807 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Sanggau memiliki 15 kecamatan yang berada di wilayah administrasinya, dari 15 Kecamatan tersebut terdapat 2 kecamatan yang bersinggungan atau berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia tepatnya di daerah Malaysia timur, 2 kecamatan ini adalah Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam yang memiliki garis perbatasan sepanjang 129,5 Km<sup>2</sup>. Terdapat banyak kasus penyelundupan narkoba yang terjadi di daerah perbatasan di Kabupaten Sanggau, hal ini bisa dibuktikan dengan maraknya penangkapan para pelaku penyelundupan oleh pihak-pihak yang bertugas untuk menjaga perbatasan yang terdapat di Kabupaten Sanggau ini, data kasus terbesar dari Januari hingga

agustus 2017 ini yaitu penggalan penyelundupan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada April 2017 dengan barang bukti sabu seberat 20 kg yang diselundupkan dari Malaysia dari Pos Lintas Terpadu Entikong yang akan dibawa keluar daerah. Jalur perbatasan di Kabupaten Sanggau terkenal sangat rawan akan penyelundupan barang ilegal termasuk narkoba, terutama pada perbatasan Entikong yang merupakan Pos Lintas Batas Negara yang telah resmi dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melakukan berbagai pengecekan dan pemeriksaan masih sangat minim sehingga menyebabkan masih sering lolosnya para penyelundup. Sepanjang tahun dari awal hingga pertengahan 2017 ini Kejaksaan Negeri Sanggau telah menangani sebanyak setidaknya 43 kasus yang mana dari 43 kasus tersebut didominasi oleh kejahatan narkoba baik itu kasus penyelundupan, penyebaran dan pemakai narkoba.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya kawasan perbatasan sebuah negara merupakan beranda depan atau muka dari sebuah negara, oleh sebab itu akan sangat penting bagi sebuah negara untuk menjaga dan melindungi keberadaan perbatasan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi wilayah dan warga masyarakat dari negara itu sendiri. Pada bagian ini penulis akan memaparkan faktor yang mendorong mudahnya aktifitas penyelundupan narkoba di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat, terdapat tiga faktor utama yang mendorong mudahnya kegiatan penyelundupan narkoba dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia antara lain, pertama adalah factor minimnya infrastuktur pos perbatasan yang ditempatkan di perbatasan Indonesia dan Malaysia, yang kedua kurangnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang bertugas dalam melakukan penjagaan di daerah perbatasan ini, yang ketiga kurang pedulinya masyarakat perbatasan dengan kasus penyelundupan narkoba di wilayah mereka akibat pengetahuan yang minim pada kasus tersebut.

## **A. Pos Perbatasan dan Sarana Infrastruktur Penjagaan Perbatasan**

Di pulau Kalimantan ini terdapat delapan Kabupaten yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, terdiri dari lima Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Satu kabupten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan dua Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, yang mana perbatasan tersebut terletak di lebih dari dua puluh Kecamatan. Dari ketiga Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini pos lintas batas resmi hanya terdapat di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau) dan akan menyusul Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu) dan Aruk atau Temajok (Kabupaten Sambas) yang baru pada tahun 2017 ini diresmikan oleh pemerintah selain dengan minimnya pos lintas resmi yang dimiliki Indonesia di perbatasan di kalimantan yang mencapai lebih dari 2000 km minimnya sarana yang dimiliki di Pos Perbatasan menjadi kendala dalam aparat yang bertugas di Pos Lintas Batas ini untuk melakukan pengecekan sehingga sering terjadinya peristiwa lolos dan masuknya barang-barang illegal seperti narkoba dan obat-obat terlarang dan lainnya sehingga tersebar di kawasan Kalimantan Barat ini. Selain itu, tapal batas resmi yang memiliki kekurangan. Kekurangan lainnya adalah memang terdapat tapal batas atau Pos Lintas Batas yang tidak resmi antara Sarawak Malaysia dan Kalimantan Barat, akan tetapi Sebagaimana telah diidentifikasi oleh kedua pemerintah (Kal-Bar dan Sarawak) bahwa dari sekitar 800 km panjang perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, terdapat lebih kurang 50 jalur jalan setapak (jalan tikus) yang telah diidentifikasi yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak yang sekaligus merupakan pintu atau tempat keluar masuk orang dan barang dari dan ke Sarawak Kalimantan Barat atau Sarawak ,sedangkan pos lintas yang telah disepakati oleh kedua pihak sebagai pos keluar masuk sesuai persetujuan lintas batas tahun 1984 hanya sebanyak sepuluh pos saja yang telah menghubungkan sepuluh desa di Kalimantan Barat dan tujuh Desa di Negara bagian Sarawak Malaysia. jumlah jalur illegal

yang di jelaskan diatas merupakan jalur yang telah diketahui saja, bisa di indikasikan masih banyak jalur lainnya yang belum di temukan di daerah Kalimantan Barat. Selain di provinsi Kalimantan Barat jalur tikus yang lebih banyak di indikasikan di Kalimantan Utara tepatnya di Kabupaten Nunukan lebih dari 10.000 'jalur tikus' sebagai tempat keluar masuknya narkoba di ketahui berada disana. Dengan berbagai kekurangan dalam pengamanan pos lintas batas negara yang dimiliki oleh Indonesia, hal ini yang menyebabkan kurang terpantaunya daerah perbatasan yang dimiliki oleh Indonesia yang berada di pulau Kalimantan dan sehingga mempermudah para pelaku aktor kejahatan transnasional baik itu narkoba dan kejahatan lainnya untuk terus menciptakan jalur-jalur illegal lainnya untuk mempermudah mereka melakukan aktivitas penyelundupan, oleh karena itu seharusnya pihak pemerintah Indonesia melakukan inisiatif untuk menambah sarana prasarana dan infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia di daerah perbatasan.

## **B. Sumber Daya Manusia yang Ditempatkan di Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat**

Faktor kedua yang menyebabkan mudahnya penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat adalah kurangnya penempatan aparat yang ditugaskan dalam menjaga dan mengamankan perbatasan, dari narkoba dan obat-obat terlarang dan lainnya. Menurut data Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas) RI yang memiliki anggota terbanyak dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di perbatasan Kalimantan Barat dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyelundupan Narkoba. Yonif 144/JY di Sektor Barat dan Yonif 312/KH di Sektor Timur memiliki 700 orang personel, sedangkan terdapat 46 pos di sepanjang perbatasan perbatasan Entikong dan saingan dengan panjang perbatasan sepanjang 900 kilometer, ditambah dengan Kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pencegahan

jumlah personel masih dirasakan kurang mengingat medan dan panjang keseluruhan perbatasan di Kalimantan Barat saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dimana Panglima TNI menjadi salah satu anggota dari sekian banyak stakeholder dalam susunan keanggotaan. BNPP, dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/12/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Operasi Pamtas, maka tugas pokok Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan adalah menciptakan stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Selain itu, Satgas juga bertugas menjamin keutuhan wilayah di perbatasan dengan tidak terjadi pergeseran atau hilangnya patok batas, mewujudkan wilayah yang bebas dari pelanggaran pelintas batas, penebang kayu ilegal dan penyelundupan, serta mencegah terjadinya penyelundupan bahan peledak dari Malaysia ke Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Satgas Pamtas seharusnya dapat terlibat secara langsung dalam upaya penanganan berbagai bentuk kegiatan ilegal di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat, termasuk diantaranya pengawasan dan pencegahan penyelundupan Narkoba. Hal lain yang mendukung keterlibatan TNI dalam pencegahan penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan adalah adanya forum kerja sama Indonesia dan Malaysia yang disebut General Border Committee (GBC). GBC merupakan lembaga yang diketuai oleh Panglima Tentara Nasional dari kedua negara dan membawahi lima bidang atau sub komite. GBC membahas isu dan permasalahan perbatasan di bidang sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan di antara RI-Malaysia. Namun demikian, lembaga ini tidak memiliki anggaran, aparat dan prasarana yang mandiri karena bukan institusi yang bersifat struktural. Dengan berbagai kondisi pendukung yang ada, pengawasan dan pencegahan penyelundupan Narkoba di perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak masih belum optimal dengan masih adanya berbagai

keterbatasan yang dihadapi baik dari sisi kekuatan, kemampuan maupun gelar Satgas Pamtas itu sendiri. Jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan perbatasan tidak seimbang dengan panjang bentangan perbatasan. Perbatasan yang panjangnya 966 Km hanya diamankan oleh 46 Pos Pamtas yang berkekuatan rata-rata 15 orang di setiap 8 posnya. Pelaksanaan tugas Pamtas juga kurang optimal karena terbatasnya sarana prasarana dan Alutsista Satgas. Kondisi pasukan Pamtas yang tidak bersifat permanen juga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam implementasi tugas-tugas yang dilakukan.<sup>2</sup>

### **C. Peran Masyarakat Perbatasan Dalam Menanggapi Masalah Penyelundupan Narkoba**

Masyarakat sebagai salah satu elemen penting yang bertempat tinggal di suatu daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menjaga dan melindungi daerah mereka tinggal, begitupun pada kasus penyelundupan narkoba di perbatasan, dalam upaya menghambat masuknya narkoba perlunya kerjasama masyarakat sekitar, akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat akan kasus penyelundupan narkoba dan bahaya narkoba menjadi halangan tersendiri. Pentingnya pengetahuan akan penyelundupan narkoba bermanfaat untuk terhindar dari terlibat dan mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja membantu penyelundupan. Seperti kasus yang menimpa nelayan di perbatasan di karimun yang di manfaatkan oleh oknum penyelundup narkoba sebagai sarana untuk membawa keluar masuk narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Pada kasus lainnya di perbatasan Entikong sering terjadi penyelundupan narkoba melibatkan warga setempat yang keluar masuk membawa dagangan ataupun barang kebutuhan lainnya sebagai penyamaran. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga harus sering berkoordinasi

---

<sup>2</sup> Letkol Caj Drs. Hikmat Israr, M.M. dkk, Peranan TNI AD dalam pengamanan perbatasan NKRI, Disjarahad, Bandung, 2012, hal 75.tasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).

dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan agar mengetahui dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, menyuluhkan tentang bahaya narkoba dan hukuman bagi yang melakukan kegiatan penyelundupan dan mengedarkan narkoba bagi warga perbatasan agar mereka merasa takut dan merasa bertanggung jawab untuk membantu atau paling tidak menjaga daerah mereka dari penyelundupan narkoba.

#### **D. Keterlibatan Aparat dalam Penyelundupan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang**

Sayangnya terdapat beberapa kasus keterlibatan aparat dalam penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang, salah satunya aparat yang bertugas dalam mengamankan perbatasan di wilayah Entikong Kalimantan Barat. Adapun kasus lain yang melibatkan Sipir Penjara Bengkayang, Pontianak, serta Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Terkait tiga kasus tersebut Badan Narkotika Nasional turut langsung menyelidiki kasus tersebut. Terkait dua kasus penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Kalimantan Barat yang dikendalikan narapidana dari dalam penjara. Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Kepolisian dari wilayah tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Tertangkap 28.240 gram shabu dan 21.727 butir ekstasi dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Sebanyak empat tersangka dalam kasus itu ditangkap. Kasus lainnya terjadi Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dua orang ditangkap. Dalam mobil yang dinaiki keduanya ditemukan 7 kg shabu dan 21.727 ekstasi. Selain itu, kasus lain tertangkap aparat Kepolisian yang terdapat menjadi kurir narkoba dan dijanjikan apabila berhasil meloloskan narkoba tersebut, mereka akan mendapatkan upah senilai dua puluh lima juta rupiah untuk perkilo barang haram tersebut. Badan Narkotika Provinsi menyelidiki kasus tersebut lebih mendalam. Modus operandi ini adalah dengan berjalan kaki melewati perbatasan melalui 'jalur tikus' di Entikong. Setelah berhasil melewati perbatasan, para tersangka kemudian menggunakan kendaraan

roda empat untuk membawa narkotika tersebut. Dengan menindak lanjuti kasus ini, ditemukan 32 kilogram narkotika dan obat-obat terlarang yang akan diselundupkan oleh tersangka<sup>3</sup>.

Beberapa kasus yang terungkap mengindikasikan daerah ini kerap menjadi incaran aksi jaringan narkoba lintas negara. Adapun kasus lainnya Barang selundupan itu berasal dari Malaysia dan diduga masuk melalui Pos Pemeriksaan Lintas atas Entikong di Kabupaten Sanggau. Modus penyelundupan dilakukan antara lain dengan dibawa atau dikirim melalui bus antarnegara Kuching Malaysia - Pontianak. Lima puluh Pihak Polisi daerah (PolDa) Kalimantan Barat sendiri mengakui bahwa kawasan perbatasan darat dengan Sarawak Malaysia ini sudah menjadi sarang peredaran berbagai jenis narkoba yang melibatkan warga asing. Selain kasus di atas, Polisi Daerah Kalimantan Barat juga berhasil mengungkap tiga kasus lain pada tahun 2017, dua kasus kembali terungkap di Pos Lintas Batas Entikong, Kabupaten Sanggau, sedangkan satu kasus terungkap di Pos Lintas Batas Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Di Jagoi Babang, dua tersangka Warga Negara Malaysia ditangkap, dari dua tersangka disita sabu-sabu seberat 500 gram. Sebelumnya pada tahun 2016, di Dusun Balai Karang Kabupaten Sanggau, aparat gabungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat berhasil mengamankan 7 kilogram narkotika dan obat-obat terlarang. Dua tersangka ditangkap ketika berada di sebuah biro travel sesaat tiba dari wilayah Pos Lintas Batas Entikong. Dua tersangka tersebut berhasil masuk ke wilayah Indonesia menggunakan truk Malaysia lewat Pos Lintas Batas Tebedu (di Malaysia) yang berhadapan langsung dengan Pos Lintas Batas Entikong (di Indonesia). Jaringan narkoba yang dipasok dua tersangka tersebut dari Sarawak melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kantor Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pontianak. Pada

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, <https://m.facebook.com/bnnp>

awal 2018 juga Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat juga berhasil menangkap dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundup dan pengedar narkoba internasional. Keduanya memasukkan barang haram tersebut dari Sarawak Malaysia melalui pintu perbatasan di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Kedua tersangka saat ditangkap sedang mengendarai motor di jalan sekitar Kantor Camat Singkawang Barat di Kota Singkawang. Saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan satu klip plastik transparan berukuran kecil yang di dalamnya terdapat empat klip plastik transparan berisi serbuk narkoba jenis sabu. Kedua tersangka, yang diduga sebagai bagian dari jaringan narkoba internasional untuk wilayah Singkawang, Bengkayang dan Sambas Kalimantan Barat ini, sudah lama menjadi target operasi Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat. Pada pertengahan tahun 2018, Polisi Daerah Kalimantan Barat juga kembali menggagalkan penyelundupan sabu yang masuk dari perbatasan Aruk Kabupaten Sambas - Biawak Malaysia. Narkotika seberat 8 kg itu disimpan dalam sebuah mobil yang dibawa oleh dua tersangka. Pada awal agustus 2018 Badan Narkotika Provinsi juga kembali menangkap tiga bandar narkoba internasional di Desa Balai Karang, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, dan mengamankan 5 kg Narkotika dari Malaysia. Ketiga bandar sabu tersebut sudah lama menjadi target Badan Narkotika Nasional dan namanya sudah tercatat dalam buku hitam Badan Narkotika Nasional sebagai pemain narkoba jaringan internasional. Banyaknya kasus penyelundupan narkoba yang terungkap di Kalimantan Barat tersebut mengindikasikan bahwa Kalimantan Barat bukan hanya daerah transit, melainkan daerah pemasaran narkoba. Pihak Badan Narkotika Nasional sendiri pernah mengatakan bahwa Kalimantan Barat masuk dalam kategori darurat peredaran narkotika dan obat-obat terlarang<sup>4</sup>. Dari banyaknya kasus tersebut, tidak mengherankan jika kemudian Kalimantan Barat disebut juga sebagai jalur sutra masuknya narkoba, maupun barang ilegal lainnya, ke Indonesia. Perbatasan darat

---

<sup>4</sup> AKBP Iskandar *Satuan Reserse Narkoba*, Wawancara, 8 Desember 2018

yang panjang, pengawasan aparat yang terbatas dan minimnya perangkat pendeteksi di pos-pos perbatasan, termasuk di Pos Lintas Batas Entikong, diduga menyebabkan bumi khatulistiwa ini tidak saja menjadi daerah transit tetapi juga merupakan daerah pemasaran narkoba dan obat-obat terlarang. Belum lagi ada oknum aparat yang ikut “bermain”, dan potensi penyimpangan itu sangat mungkin terjadi jika melihat kondisi di lapangan di mana petugas terkadang tidak terlalu ketat dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang maupun orang yang keluar-masuk di pos lintas batas. Kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh sindikat atau jaringan internasional, termasuk yang melibatkan warga negara Malaysia, untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia.

Dari berbagai kasus di atas, dalam hal menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba dan obat-obat terlarang dibutuhkan suatu badan untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba ke Indonesia yang bersifat proaktif dalam menanggulangnya, karena para pelaku tindak pidana penyelundupan narkoba dan obat-obat terlarang seperti dijelaskan sebelumnya menggunakan Alasan-Alasan yang sangat canggih dan beragam. Pemerintah Indonesia memerlukan upaya penting dari Badan Narkotika dalam mencegah hal tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Non Kementerian yang berada langsung di bawah pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Badan Narkotika Nasional dibentuk dengan tujuan untuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang ini, melihat peredaran Narkotika yang semakin canggih dan berbagai macam Alasan penyebaran. Badan Narkotika Nasional tidak hanya fokus memberantas penyalahgunaan Narkotika yang ada di dalam negeri saja, akan tetapi pemberantasan peredaran gelap narkoba dan

psikotropika antar negara juga dilakukan mengingat narkoba adalah ancaman yang serius. Salah satu kejahatan yang saat ini telah menjadi perhatian dunia dan harus diselesaikan dengan serius ialah masalah narkoba, dengan cara memperjual belikan barang haram tersebut secara diam-diam. Keberadaan Badan Narkotika Nasional di tingkat kabupaten/kota belum secara menyeluruh dibentuk sehingga penanganan kasus-kasus narkoba masih menjadi tugas Kepolisian. Begitu juga, Badan Narkotika Nasional memiliki hambatan yang dihadapi. Hambatan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Belum dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia guna mencegah penyelundupan dan peredaran gelap narkoba jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi tersebut terdiri dari petugas Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pintu masuk jaringan narkoba Internasional.
2. Belum tersedianya alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkoba masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak
3. Banyaknya jalur/jalan tidak resmi (terdapat sekitar 55 jalan tikus) antara perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia dengan panjang perbatasan darat sekitar 966 kilometer sehingga sulit untuk mendeteksi peredaran gelap narkoba jaringan internasional tersebut.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak dengan cara:

- (a) Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak guna mencegah peredaran narkoba jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi ini terdiri dari petugas Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan kalau pihak penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan dalam prakteknya mereka dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- (b) Menyediakan alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkoba masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia.
- (c) Melakukan kerjasama dengan warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan untuk memberikan laporan setiap terjadinya kejahatan narkoba di wilayah perbatasan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, <https://bnn.weebly.com>